



Universitas Widya Mataram +

Pernyataan Sikap atau Berceramah?: Tanggapan atas Pernyataan Sikap UWMY yang Tidak Bersikap dan Moralis

6 min read · Sep 2, 2025



abc+uwmy

Follow



Share



Bagi kelas tertentu, situasi yang kondusif tidak pernah benar-benar ada dan turun dari surga ke bumi. Jadi, ketika seseorang atau kelompok individu mendeskripsikan

kondisi akhir-akhir ini sebagai ke-tidak-kondusif-an, maka dapat terlihat dari kelas atau golongan mana mereka berasal. Mereka berpendapat demikian, karena privilese mereka terganggu oleh kekacauan yang saban hari secara paksa selalu mendobrak masuk pintu rumah rakyat miskin. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh kelas yang tak pernah merasakan ke-kondusifitas-an ini “menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat luas”, kami dapat mengatakan bahwa mereka cenderung menempatkan kata “dampak” ini di depan kata “buruk” atau “merugikan”; dan menaruh kata “dampak” sebagai upaya generalisasi sekaligus oversimplifikasi, ini terbukti dari argumen-argumen mereka yang cenderung bergerak ke arah mendiskreditkan.

Hasrat untuk menghancurkan adalah hasrat kreatif juga.

—Mikhail Bakunin

Milikilah keberanian untuk merusak, maka kau akan melihat bunga-bunga indah tumbuh dari reruntuhan bangunan yang telah kau luluhlantakkan.

—Max Stirner

1

Pada poin pertama saja, aksi-aksi yang mengarah pada penggunaan kekerasan dan perusakan dikutuk serta dilabeli sebagai “tindakan anarkis” oleh UWM, karena dianggap dapat mencemari “aksi-aksi yang mulia” nan “tulus”. Bahkan tindakan-tindakan tersebut dianggap dapat merugikan semua pihak—betapa bias dan menggeneralisir! Ditambah, UWM meminta aksi-aksi “perusakan dan penjarahan” yang diarahkan kepada rumah-rumah para tokoh pemerintah dihentikan atau “agar tidak terjadi lagi”, dan setelahnya secara tiba-tiba mengatakan “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (?).

1.1

Dengan menggeneralisir semua pihak mendapat kerugian, memperlihatkan bahwa UWM tidak pernah benar-benar napak tanah. Mereka seolah-olah buta atau bahkan menolak mengetahui, bahwa kekerasan dan perusakan itu merupakan bahasa terakhir untuk menghadapi penguasa, ketika bahasa “perdamaian” tidak lagi didengar—atau akan lebih tepat bila dikatakan tidak pernah didengar—oleh penguasa atau negara. Padahalnya dengan menggunakan kekerasan dan perusakan, aksi menjadi mendapat sorotan mata yang dimediasi kamera dari skala internasional hingga nasional, dan rakyat miskin menjadi didengar dan eksistensinya diakui.

1.2

Setidak-tidaknya, jika kalian tidak dapat turun ke jalan—atas alasan apapun!—cobalah jangan berdiam diri dan sok menjadi hakim, ketika orang-orang yang kalian diskreditkan dan kutuk itu mengalami represi negara dan terpaksa harus menggunakan kekerasan dan perusakan sebagai respon. (Tidak ada kekerasan di awal kalian bilang? Setiap hari mereka mengalami kekerasan!).

1.3

Maka, jangan marah ketika halte, pos-pos dan markas polisi, dan gedung-gedung pemerintahan dibakar; jangan marah ketika rumah-rumah pemerintah negara mengalami penjarahan. Karena kalian tidak pernah benar-benar marah dan bertindak ketika hutan-hutan hujan Kalimantan, Maluku, Papua dan daerah-daerah lain mengalami deforestasi akibat perluasan kebun kelapa sawit, penebangan legal (yang dilakukan negara/perusahaan), dan pertambangan. Jangan bersembunyi di balik ketiak netralitas!

State behavior is an act of violence, and it calls its violence “legal right”; that of the individual, “crime”.
—Max Stirner

2

Kalian begitu naif, karena menyesalkan polisi yang melakukan tindak kekerasan dan represi; dan menuntut agar para demonstran diperlakukan sebagai individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta menuntut agar sesegera mungkin dilakukan perbaikan pada tata kelola pemerintahan. Dan dengan demikian meminta agar polisi tidak menjadikan para demonstran sebagai musuh mereka.

Get abc+uwmy's stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Subscribe

2.1

Hal yang kembali UWM lupakan, bahwa bahasa negara sudah sedari awal selalu merupakan kekerasan dan represifitas; terlihat dari bagaimana mereka memaknai represifitas dan kekerasan yang mereka lakukan, alih-alih dimaknai sebagai tindakan kriminal malah dianggap sebagai “hukum”. Berbeda dengan individu yang ketika melakukan tindakan kekerasan untuk melawan balik, maka ia akan dicap sebagai “kriminal”. Sehingga meminta kepada kepolisian atau negara agar tidak menjadikan para demonstran sebagai musuh merupakan kemustahilan, karena dari kacamata negara posisi mereka bersebrangan: polisi (negara) = hukum v.s individu (demonstran) = kriminal.

3

Lagi-lagi, meski di poin yang berbeda, UWM tetap masih membicarakan penggunaan kekerasan dan represifitas polisi. Lalu, mengsimplifikasi kejadian yang menewaskan Affan Kurniawan (Jakarta: dilindas kendaraan taktis/rantis Brimob Polda Metro Jaya, 28/8), Septinus Sesa (Manokwari: korban diduga gas air mata oleh aparat kepolisian, 28/8), Sarina Wati (Makasar: korban kebakaran gedung DPRD Makasar, 29/8), Saiful Akbar (Makassar: korban kebakaran gedung DPRD Makasar, 29/8), Rusdamdiansyah (Makassar: korban pengeroyokan oleh massa tak dikenal, 29/8), Muhammad Akbar Basri (Makassar: korban kebakaran gedung DPRD Makasar, 29/8), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta: korban pengeroyokan polisi, 31/8), Sumari (Surakarta/Solo: korban gas air mata polisi, 29/8), Andhika Lutfi Falah (Tangerang: korban penyiksaan oleh polisi, 1/9), Iko Juliant Junior (Semarang: korban aniaya polisi, 1/9), seolah-olah sekadar sebagai permasalahan hukum semata.

3.1

Padahal ini merupakan akibat dari kekuasaan yang tersentral, yang terfiksasi secara mistis dalam bentuk negara. Secara otomatis, sedari awal upaya pendirian sampai upaya untuk mempertahankannya, kekuasaan yang tersentral dan terpusat memerlukan pasukan bersenjata dan seperangkat alat hukum. Hal-hal tersebut akan digunakan untuk menyerang ketika ada yang mencoba mengganggu-gugat

kekuasaan terpusat yang sudah mantap itu, atau dalam kata lain digunakan untuk membungkam suara individu-individu yang tidak terima dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat negara—untuk melawan musuh mereka, yaitu para kriminal (lawan dari hukum): individu-individu atau masyarakat.

4,5,6,7,8,9

Dalam poin-poin tersebut, kami hanya bisa tertawa, karena terlihat bahwa kalian terlalu tidak napak tanah dan cenderung menggunakan perspektif negara—tipikal kelas... . Jika kalian mengira bahwa negara yang dipenuhi oleh tindak KKN, ketidakefisienan, pemborosan anggaran, dll., sebagai bukti bentuk dari kegagalan pengelolaan negara, kami justru tidak menyepakatinya. Kami justru berpendapat sebaliknya: hal-hal yang dianggap kegagalan negara tersebut merupakan bukti dari fungsi mereka yang sesungguhnya dan sebagaimana mestinya: menindas, mendominasi, dan merugikan. Kekuasaan yang tersentral dan terpusat sendiri sudah sedari awal akan menerapkan kebijakan (yang tidak bijak) top-down, kebijakan tersebut sendiri tidak dapat dikatakan sebagai keluar tanpa adanya pengkajian secara mendalam, justru sebaliknya, kebijakan-kebijakan top-down mereka yang banyak merugikan rakyat justru dikaji secara mendalam, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan para penguasa. Mereka akan memikirkan secara masak-masak, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Dan jika kalian mengharapkan negara untuk melakukan desentralisasi untuk memulihkan demokrasi, itu hanya akan menjadi sesuatu yang semu belaka. Karena desentralisasi yang sebenarnya adalah ketiadaan negara, di mana individu-individu akan membentuk kelompok-kelompok skala kecil yang saling terhubung.

10

Kalian selalu mengulang-ulang narasi kutukan pada tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh para demonstran atau masa aksi, yang disertai dengan melabelinya sebagai “tindakan anarkis”. Ini sungguh ironi, padahal kalian mengklaim diri sebagai intelektual dan akademisi, tetapi tidak mengerti dan memahami kata-kata yang kalian ucapkan sendiri. Mari kita bedah sedikit, monster bernama “anarkis” ini. Pertama-tama, anarkis dapat diartikan sebagai individu-individu atau kelompok yang memperjuangkan gagasan-gagasan anarkisme; kedua,

anarkisme dapat diartikan sebagai gagasan yang mencita-citakan pembebasan manusia; ketiga, anarki merupakan adalah situasi—yang selalu berada dalam kondisi terus-menerus berproses—ketika gagasan anarkisme telah berhasil direalisasikan oleh para anarkis, yang tidak memiliki bentuk pemerintahan atau kekuasaan terpusat. Bila ingin menautkan kata “anarkis” pada tindakan kerusuhan sendiri sebenarnya bukanlah masalah, karena kerusuhan yang mengarah pada insureksi, merupakan salah satu dari beragam taktik yang digagas dan dipraktikkan oleh para anarkis. Tetapi, akan menjadi masalah bila kata anarkis tersebut ditempatkan tanpa konteks, seperti mengatakan bahwa polisi atau ormas bertindak anarkis, karena mereka memiliki pemahaman yang jelas berbeda; atau mengatakan bahwa demonstran bertindak anarkis, karena akan menggeneralisir semua pemikiran individu-individu yang terlibat dalam aksi—meski... kami sih tidak peduli-peduli amat sebenarnya, jika kalian menyalahpahami. (duh capek, kalian baca sendiri deh ya!).

10.1

Jika tidak ingin bertindak menggunakan metode atau taktik kekerasan—yang sebenarnya diperlukan, karena negara tidak akan membiarkan kalian bertindak memprotes dan melawan mereka begitu saja—daripada sok menjadi hakim, kalian dapat membangun, bertindak, dan menggunakan metode serta taktik yang lain: untuk saling melengkapi. Tetapi, pertanyaannya, apakah kalian punya? Sepertinya kalian masih bergerak di situ-situ aja.

Untuk mengantisipasi, jika kalian mengatakan mengapa mengkritik “pernyataan sikap” atau “ucapan belasungkawa”, maka kami akan menjawab: itu bare minimum!

Ditulis secara kilat oleh WK

Referensi bacaan:

The Unique and Its Property – Max Stirner

Keberanian Merusak – Max Stirner

Statism and Anarchy – Mikhail Bakunin

Untuk Setiap Henry Miller yang Salah Jalan – Reyhard Rumbayan

Desert – Anonim

Blok Pembangkang – Ferdhi F. Putra

Anarkisme: Panduan untuk Pemula – Ruth Kinna



Follow

Written by abc+uwmy

7 followers · 8 following

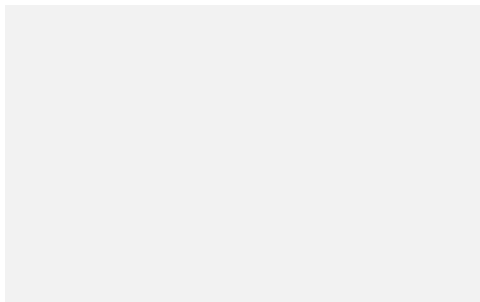
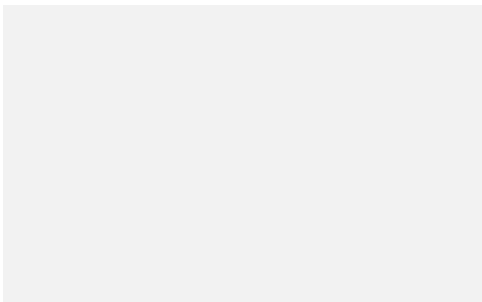
anti-authoritarian of fvcking feudal widya mataram university



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]



[Redacted text]

[Redacted text]